



INFORMASI PUBLIK:
Hak Anda untuk tahu!
www.kip.bantenprov.go.id

KLIPING KORAN

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

Halaman 1. dari 1.

Harian Nasional : ☐ Kompas ☐ Media Indonesia ☐ Seputar Indonesia
☐ (lainnya)

Harian Lokal : ☐ Radar Banten ☐ Kabar Banten ☐ Satelit News
☒ Banten Pos ☐ (lainnya)

Hari/Tanggal : Kamis, 7 September 2023 Halaman Koran : 1 & 2

Al Izinkan Timsel RANGKAP JABATAN

SERANG, BANPOS - Kasus rangkap jabatan anggota Tim Seleksi (Timsel) calon anggota Komisi Informasi (KI) Provinsi Banten menuai sorotan dari berbagai pihak, namun meski begitu, Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengaku bahwa dirinya tidak terlalu mempersoalkan itu.

Alasan ia tidak terlalu mempersoalkan masalah itu karena dirinya mengaku tidak begitu mengetahui jika ada aturan yang melarang anggota timsel di satu instansi, merangkap menjadi anggota timsel di instansi lainnya.

Oleh karenanya ia mempertanyakan, apakah ada aturan yang melarang mengenai hal tersebut. "Tidak boleh ya



Al Muktabar

rangkap jabatan?" kata Al kepada BANPOS pada Rabu (6/9).

Saat disinggung soal adanya tuntutan dari masyarakat yang meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten untuk bisa menindak tegas anggota timsel yang rangkap jabatan, karena dikhawatirkan dapat merusak nilai integritas, lagi-lagi Al justru balik bertanya mengenai ketentuan yang mengatur soal rangkap jabatan.

Karena menurut pemahamannya, tidak ada aturan yang melarang anggota timsel merangkap jabatan menjadi anggota timsel di instansi lain.

"Ya kita sih pertama, ada gak aturan
BACA AL IZINKAN HAL - 9

Al Izinkan...

Sambungan dari Halaman 1

yang dilanggar? Itu dulu pedomannya gitu ya," ujarnya.

Oleh karenanya, ia meminta kepada semua pihak untuk bisa memberikan masukan kepadanya, agar ia mengetahui aturan mana yang mengatur soal larangan rangkap jabatan anggota timsel.

"Mungkin dapat input juga kali ya, aturan yang mana" ucapnya.

Di samping itu ia juga menjelaskan, alasan lain mengapa dirinya tidak terlalu mempermasalahkan rangkap jabatan timsel adalah karena Al berpandangan masalah teknis.

Meski proses pelaksanaan seleksi calon anggota KI dan KPU dilaksanakan di waktu yang bersamaan, namun menurut Al, hal itu pastinya tidak akan berjalan di waktu

yang sama persis.

Semua itu bisa diatur secara teknis, selagi memang yang bersangkutan bisa menyanggupinya.

"Kan bisa diakselerasi kan, gak mungkin juga dipasang dalam menit yang sama, hari yang sama. Itu pengaturan teknis lah, mangga saja," jelasnya.

Meski terkesan menyangkal, namun Al mengaku jika dirinya tidak menutup diri terhadap sejumlah

masukan dari penilaian masyarakat.

Ia mengatakan, bila memang terbukti bahwa rangkap jabatan adalah sebuah pelanggaran, maka pihaknya akan segera melakukan perbaikan terhadap struktur keanggotaan timsel KI Provinsi Banten.

"Iya pada aturan saja, kalau ada yang dilanggar, mangga kita perbaiki," tandasnya. (CR-02/PBN)